BIBLIOGRAPHY

Book

Amrani, Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2019.

Ancel, Marc. *Social Defence*. London: Routledge, 1965.

Friedman, Lawrence M., and Grant M. Hayden. *American Law: An Introduction*. New York: Oxford University Press, 2017.

Nasution, A. Z. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2001.

Siegel, Larry J. *Criminology*. Belmont: Wadsworth, 2012.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

Suryanto, Mikael Hang. *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*. Jakarta: PT Grasindo, 2016.

Sutherland, Edwin H., et al. *Principles of Criminology*. California: Bloomsbury Academic, 1992.

Sudaryono, and Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Abidin, Andi Zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni, 1987.

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti, 1998.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

Wati, Emy Rosna, and Abdul Fatah. *Hukum Pidana*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020.

Ardiansyah. *Hukum Perizinan*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. *Hukum Perlindungan Konsumen: Hubungan Konsumen dan Produsen, Asas, Tujuan dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana*. Denpasar: Udayana University Press, 2020.

Rudy, Dewa Gde, et al. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Simatupang, Nursariani, and Faisal. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV Pustaka Prima, 2017.

Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

Pratama, Dimas Wahyu, et al. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Adikara Cipta Aksa, 2025.

Kusumadewi, Yessy, and Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.

Lamintang, P.A.F., and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Cartwright, Peter. *Consumer Protection and the Criminal Law: Law, Theory, and Policy in the UK*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Journal

Anisha, M. "Identification of Pattern in Crimes: A Study on Principle of Modus Operandi and Its Attributes." *International Journal of Law Management & Humanities* Vol. 3, No. 1 (2024).

Cohen, Lawrence E., and Marcus Felson. "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach." *American Sociological Review* Vol. 44, No. 4 (1979).

Ferdinand, Michelle, and Wakhid Slamet Ciptono. "Indonesia's Cosmetics Industry Attractiveness, Competitiveness, and Critical Success Factor Analysis." *E-Journal Universitas Airlangga* Vol. 15, No. 2 (2022).

Nafliana, Ela Aprida. “Penegakan Hukum terhadap Influencer yang Mengiklankan Produk Kosmetik Ilegal pada Platform Instagram.” *Sibatik Journal* Vol. 2, No. 5 (2023).

Putri, Asti Nurmala, and Rani Apriani. “Perlindungan Konsumen atas Peredaran Skincare yang Belum Mendapat Izin Edar dari BPOM.” *UM-Tapsel Press* Vol. 9, No. 3 (2022).

Putri, Tiara Susilo, et al. “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik Kecantikan yang Tidak Layak Edar.” *QISTINA* Vol. 3, No. 1 (2024).

Rahardian, Jovanka Boby, et al. “Peran Pengawasan Marketplace terhadap Produk Kecantikan Tanpa Izin Edar.” *Borobudur Law and Society Journal* Vol. 2, No. 1 (2023).

Rumahorbo, Liberti, and Hudi Yusuf. “Analisis Mendalam Perilaku Menyimpang White-Collar Crime.” *Media Hukum Indonesia* Vol. 3, No. 3 (2025).

Winata, Melina Gabrila. “Perlindungan Hukum bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya.” *Journal Sapientia et Virtus* Vol. 7, No. 1 (2022).

Iin Febrianti Sende, et al. “Peredaran Kosmetik Pemutih Ilegal di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya.” *Eruditio*Vol. 1, No. 1 (2020).

Firmantoro, Kiki, and Suvinah. “Kosmetik Ilegal, Otoritas Pengawasan dan Profesi Medis: Kajian Hukum Administrasi di Indonesia.” *Humaniorum* Vol. 3, No. 3 (2025).

Wiyono, Tri Sulismuji. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* Vol. 4, No. 1 (2020).

Sari, Putri Mawar, and Bambang Widarto. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Produsen Pedagang yang Melakukan Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar.” *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum* Vol. 1, No. 1 (2024).

Januarsyah, Mas Putra Zenno. “The Implementation of Ultimum Remedium Principle in Criminal Case of Corruption.” *Jurnal Yudisial* Vol. 10, No. 3 (2017).

Supadmo, Darto, and Irwan Triadi. “Akses terhadap Layanan Kesehatan di Indonesia sebagai Bagian Hak Asasi Manusia dalam Konteks Kesehatan bagi

Warga Kurang Mampu." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 9, No. 3 (2024).

Damanhury, Ardhy, et al. "Penerapan Metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Sainmikum* Vol. 2, No. 1 (2025).

Asnawi, et al. "Analisis Yuridis Pengaturan Kewenangan Pengawasan terhadap Produk Farmasi dan Alat Kesehatan dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Jurnal Cahaya Mandalika* Vol. 4, No. 1 (2023).

Kurniawan, Franky, et al. "A Juridical Review of Informed Consent Based on Law Number 17 of 2023 Concerning Health as a Replacement for Law Number 36 of 2009." *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 14, No. 1 (2024).

Purwodono, Indri Juvike, et al. "Tindak Pidana Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memenuhi Standar Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Lex Privatum* Vol. 15, No. 2 (2025).

Gondokusumo, Marisca, and Nabbilah Amir. "Peran Pengawasan Pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia." *Perspektif Hukum* Vol. 21, No. 2 (2021).

Safitri, Siti Shalima. "Interrelasi Denda Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup Pasca Perppu Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol. 9, No. 2 (2023).

Amanda, Jelli Putra, et al. "Penegakan Hukum terhadap Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar." *Collegium Studiosum Journal* Vol. 7, No. 2 (2024).

Yunita, Winda, and Riza Yudha Patria. "Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Produk Barang Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *KeadilaN: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* Vol. 20, No. 2 (2022).

Ariestiana, Evita. "Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras dan Obat-Obat Tertentu Melalui Media Online." *Indonesian Private Law Review* Vol. 1, No. 2 (2020).

Arman, Zuhdi, and Riko Riyanda. "Administrative Penal Law dalam Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 17, No. 2 (2022).

Alfahrizi, Raihan, et al. “Penguatan Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Peredaran Minuman Keras Ilegal di Indonesia.” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* Vol. 8, No. 1 (2025).

Yuliani, Evelina, et al. “The Urgency of Law Enforcement of Illegal Medicine Distributions in Indonesia.” *Journal of Health Policy and Management* Vol. 4, No. 2 (2019).

Hadimulya, Tantra, et al. “Penegakan Hukum terhadap Pengedaran Obat-Obatan yang Tidak Memiliki Izin Edar pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurisdictie* Vol. 2, No. 1 (2020).

Swary, da Ayu Widya, and Made Gde Subha Karma Resen. “Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Indonesia.” *Jurnal Kertha Desa* Vol. 12, No. 6 (2024).

Lastini. “Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Lex Privatum* Vol. IV, No. 6 (2016).

Tirtayasa, I Gede, et al. “Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Denpasar.” *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 3, No. 1 (2022).

Purba, Andika Temanta, and Wessy Trisna. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik yang Memperdagangkan Produk Tidak Memenuhi Standar.” *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 3, No. 1 (2024).

Habib, Yahya Abdul, and Jacobus Jopie Gilalo. “Penyelesaian dan Sanksi atas Tindak Pidana Konsumen terhadap Kejahatan Pelaku Usaha.” *IBLAM Law Review* Vol. 4, No. 2 (2024).

Anjani, Ni Wayan Cinthya Dwi, and Putu Devi Yustisia Utami. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kelalaian Pengolahan Bahan Makanan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Kertha Negara* Vol. 12, No. 4 (2024).

Hikmawati, Puteri, et al. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen: Perbandingan Pengaturan Beberapa Negara.” *Foreign Legislation Analysis* Vol. 2 (2024).

Wicaksono, Dimas, et al. “Perlindungan Konsumen terhadap Produksi dan Peredaran Barang yang Tidak Memenuhi Standar.” *Simbur Cahaya* Vol. XXXII, No. 2 (2025).

Nasution, Shulhan Iqbal. "Mens Rea: Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 7, No. 1 (2025).

Husna, Syifa Ul, et al. "Analisis Penetapan Hukuman Pidana Menurut Teori Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Parhesia* Vol. 3, No. 1 (2025).

Muttaqin, Ahda. "A Review of the Principle Geen Straf Zonder Schuld in Criminal Liability for Fraud Through Mystical Ritual Modus." *Jurnal Peradaban Hukum Magister Hukum* Vol. 2, No. 2 (2024).

Antoni. "Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi yang Memproduksi Kosmetik Palsu Membahayakan Kesehatan Konsumen." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* Vol. 6, No. 2 (2022).

Sari, Novita, et al. "Pengawasan terhadap Pemalsuan Kosmetik menurut Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Palangka Raya." *Jurnal Tata Kelola Hukum* Vol. 9, No. 3 (2025).

Ariati, Fardillah. "Kerentanan Kejaksaan Agung terhadap Korupsi dalam Perspektif Routine Activities Theory." *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6, No. 2 (2010).

Yunianto, Edi Priyo, and Yudo Anggoro. "Understanding Illegal Cosmetic Circulation in Indonesian Online Marketplace through Problem Analysis Triangle." *Journal of International Conference Proceedings* Vol. 4, No. 3 (2021).

Alduraywish, Munirah Abdullah. "Juvenile Delinquency and Differential Association Theory." *Advances in Applied Sociology* Vol. 11 (2021).

Wang, Fangzhou, and Timothy Dickinson. "Affordances, Dread, and Online Fraud: Exploring and Advancing Social Learning Theory in Online Contexts." *Criminology* (2026).

de Carvalho, Jackson, and Donna F. Ossorio. "A Comprehensive Analysis of Social Learning Theory Linked to Criminal and Deviant Behavior." *American International Journal of Contemporary Research* Vol. 11, No. 2 (2021).

Sholihin, Rahmat. "Hukum Pidana dalam Perspektif Qur'ani." *Journal of Islamic and Law Studies* Vol. 5, No. 3 (2021).

Nurhalis. "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal IUS* Vol. III, No. 9 (2015).

Lesnida. “Penggunaan Kosmetik Berbahaya dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* Vol. 15, No. 1 (2021).

Herianti, et al. “Panduan Maqasid Syariah untuk Konsumen Skincare: Integrasi Halal, Kesehatan, dan Keberlanjutan.” *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* Vol. 4, No. 1 (2024).

Bjelajac, Željko. “Modus Operandi as an Analytical Tool in Criminal Profiling.” *Pravo – Teorija i Praksa* Vol. 42, No. 4 (2025).

Becker, Gary S. “Crime and Punishment: An Economic Approach.” *Journal of Political Economy* Vol. 76, No. 2 (1968).

Alkansa, Ajeng Althafira, and Eka Nanda Ravizki, “Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 6, No. 7 (2025).

Yacob Ferdinan Martono, et al., “Peran Hukum Perizinan dalam Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Ilegal,” *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* Vol. 13, No. 1 (2026).

NGO/Other Reports

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *E-Commerce Challenges in Illicit Trade in Fakes: Governance Frameworks and Best Practices*. Paris: OECD Publishing, 2021.

National Agency of Drug and Food Control of the Republic of Indonesia. *Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2024*. Jakarta: BPOM, 2025. https://waskos.pom.go.id/storage/informasipublik/Laporan%20Tahun%20Ditwaskos%20Tahun%202024.pdf

The Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT). *Exposing Supply Chain Vulnerabilities to Illicit Trade: A Global Report on Dynamics, Hotspots and Responses Across 10 Sectors*. 2023.

OECD/EUIPO. *Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact*. Paris: OECD Publishing, 2016.

Max Planck Institute for the Study of Societies. *Illegal Markets: Boundaries and Interfaces between Legality and Illegality*. Cologne: Max Planck Institute for the Study of Societies, 2016.

Edinoff Amber N., et al., “Trihexyphenidyl,” *NCBI Bookshelf*, last updated on August 8, 2023.

INTERPOL Foundation for a Safer World, *Illicit Goods and Global Health* (Lyon: INTERPOL Foundation for a Safer World, n.d.), https://www.interpol.int/content/download/5287/file/FS%20Illicit%20Goods%20and%20Global%20Health.pdf

Domestic Legislation

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Law Number 17 of 2023 concerning Health.

Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 12 of 2023 concerning the Supervision of Cosmetic Manufacturing and Distribution.

Law Number 17 of 2023 concerning Health.

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Law Number 36 of 2009 concerning Health.

Law Number 14 of 1970 concerning the Basic Provisions of Judicial Power.

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation.

Government Regulation Number 72 of 1998 concerning the Security of Pharmaceutical Preparations and Medical Devices.

Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 12 of 2023 concerning the Supervision of Cosmetic Manufacturing and Distribution.

Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations.

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Law Number 17 of 2023 concerning Health.

Law Number 36 of 2009 concerning Health.

Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 12 of 2019 concerning Cosmetics.

Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 25 of 2025 concerning Technical Requirements for Cosmetic Ingredients.

Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law.

Government Regulation Number 29 of 2021 concerning the Organization of the Trade Sector.

Media Release

Ministry of Industry of the Republic of Indonesia. “Kemenperin Gadang Potensi Industri Kosmetik Semakin Gemilang.” *ikm.kemenperin.go.id*, February 19, 2025.

Waluyo, Dwitri. “Pasar Kosmetik Indonesia Melesat 48 Persen, Peluang IKM Berinovasi.” *indonesia.go.id*, August 19, 2024.

Ramadhan, Fadhli. “BPOM Takedown 305.000 Tautan Produk Pangan dan Kosmetik Ilegal di E-Commerce.” *DetikHealth*, July 25, 2025.

National Agency of Drug and Food Control of the Republic of Indonesia. “BPOM Tegaskan Aturan Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik Wajib Dilaksanakan Pelaku Usaha.” *pom.go.id*, February 17, 2025.

National Agency of Drug and Food Control of the Republic of Indonesia. “Kepala BPOM Taruna Ikrar Rilis Daftar Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang atau Berbahaya Periode November 2023–October 2024.” *pom.go.id*, December 3, 2024.

National Agency of Drug and Food Control of the Republic of Indonesia. “Waspada Kosmetik Ilegal: BPOM Temukan Produk Kosmetik Ilegal Senilai Rp8,91 Miliar di Akhir 2024.” *pom.go.id*, December 30, 2024.

Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia. “Data Terbaru Dukcapil: Penduduk Indonesia Tembus 288,3 Juta Jiwa per Desember 2025.” *menpan.go.id*, March 13, 2026.

Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan, “Kompleksitas Norma Pengakuan Bersalah dalam Kaca Mata Harmoni,” *Dandapala*, January 2, 2026.